

## JICA Targetkan Cetak 1.000 Pedet



KR-Endar Widodo

**Antrean sapi untuk mendapatkan pemeriksaan reproduksi.**

**WONOSARI (KR)** - Japan International Cooperation Agency (JICA) dari Universitas Yamaguchi yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Gajah Mada (UGM) sejak tahun 2022 menargetkan sampai tahun 2025 akan mampu mencetak 1.000 ekor anak sapi (pedhet) di Gunungkidul. Prosesnya sudah cukup panjang melakukan training para petugas peternakan, termasuk Kepala Dinas Peternakan,

Bidang Kesehatan Hewan dan tenaga medik veteriner dan inseminator ke Jepang. Dilanjutkan para ahli dari Universitas Yamaguchi untuk melakukan sinkronisasi birahi 120 ekor sapi peranakan Ongole (PO) milik masyarakat. "Termasuk dilakukan penanganan gangguan reproduksi (gangrep) dari JICA, dengan memeriksa sapi-sapi betina dicek reproduksinya," kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan

Kabupaten Gunungkidul Drh Retno Widyastuti, Rabu (6/11).

Tujuan kegiatan ini untuk peningkatan perbibitan ternak sapi. Indikator yang dicapai untuk perbaikan reproduksi ternak sapi antara lain penurunan open periode (jarak waktu setelah beranak hingga sapi bunting kembali) naik persen dibandingkan pada awal kegiatan. Terjadi peningkatan jumlah kelahiran sebesar 1,1 kali dibandingkan pada dimulainya kegiatan dua tahun lalu. Dengan penurunan open periode ini kelahiran sapi akan meningkat, dan pendapatan peternak semakin bertambah dengan harapan terjadi peningkatan kesejahteraan para peternak di Gunungkidul, sekaligus akan mengokohkan kabupaten ini sebagai gudang ternaknya DIY, tambahnya. (Ewi)

KURANG DARI SEBULAN, MASIH BANYAK

## Belum Melakukan Perekaman Data KTP Elektronik

**PENGASIH (KR)** - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kulonprogo agar mengintensifkan perekaman data KTP Elektronik (KTP-El) bagi pemilih pemula.

Masih banyak yang belum melakukan perekaman KTP-El. Padahal hari pemungutan suara Pilkada 2024 kurang dari sebulan. "Disdukcapil harus koordinasi dengan sekolah, panti asuhan, hingga pondok pesantren dengan cara jemput bola dalam perekaman KTP-El bagi pemilih pemula," tandas Bima Arya saat meninjau Kantor Disdukcapil Kulonprogo, Rabu (6/11).

Sekretaris Disdukcapil Kulonprogo Ernawati Sukeksi melaporkan bahwa Disdukcapil terus mengintensifkan perekaman KTP-El bagi warga yang sudah

berumur 17 tahun, karena mereka ini nantinya akan menjadi pemilih pemula dalam Pilkada 2024.

"Perekaman KTP-El bagi pemilih pemula baru kisaran 83,32 persen. Masih ada 2.056 warga calon pemilih pemula yang belum melakukan perekaman," kata Ernawati.

Tercatat data di Disdukcapil Kulonprogo 12.335 warga pemilih pemula dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Sebanyak 10.278 di antaranya sudah melakukan perekaman. Upaya intensif dilakukan agar seluruh warga Kulonprogo da-



KR-Widiastuti

**Bima Arya saat di Disdukcapil Kulonprogo.**

lam DP4 melakukan perekaman KTP-El, di antaranya sistem jemput bola.

"Sekolah-sekolah sudah kami datangi langsung untuk perekaman KTP-El bagi pelajar yang sudah berumur 17 tahun," ucap Erna.

Dikatakan Erna, jumlah warga calon pemilih pemula yang tercatat di DP4 sifatnya dinamis, karena itu terus dilakukan pemantauan.

Pada hari H pemungutan suara Pilkada 2024 pada 27 November, pihaknya tetap membuka layanan perekaman KTP-El, terutama bagi mereka yang baru berumur 17 tahun di hari itu.

"Mereka nanti sekalian bisa langsung cetak KTP-El. Kami buka layanan hingga pukul 12.00 WIB pada 27 November nanti," ujarnya. (Wid/Rul)

## KPU Kulonprogo Lantik 5.278 Anggota KPPS

**WATES (KR)** - Sebanyak 5.278 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada 88 kalurahan/kelurahan dilantik secara serentak Kamis (7/11). Usai pelantikan langsung dilanjutkan bimbingan teknis (bimtek) dalam rentan waktu 7 hingga 20 November, tertarget masing-masing PPS menyepakati jadwal bersama KPPS. "KPPS akan bertugas di 754 TPS, da-

efektif bekerja hanya satu bulan, yakni mulai 7 November hingga 8 Desember 2024," ujar Aris Zurkhanah Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM pada KPU Kulonprogo, Senin (7/11).

Dijelaskan, KPPS bertugas membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dengan



KR-Widiastuti

**KPU Kulonprogo bersama KPPS yang dilantik.**

berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibilitas. Pada setiap TPS, anggota KPPS yang bertugas sebanyak 7 orang yang terdiri atas seorang ketua dan enam anggota.

Seperti diketahui, dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman

Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, di sebutkan bahwa PPS melantik dan meminta tanda tangan pakta integritas kepada calon Anggota KPPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan sesuai dengan masa kerja KPPS. (Wid)

## Desak Bawaslu Usut Penyebar Info Tak Benar

**WATES (KR)** - Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati Agung Setyawan - Ambar Purwoko dikenal dengan Paslon Akbar, Drs Djuwardi menegaskan, paslon nomor urut 1 tersebut tetap komitmen mewujudkan Pilkada Kulonprogo 2024 berjalan baik, damai, bermartabat dan berintegritas.

"Pasangan Agung kaliyan Ambar 'Akbar' tetap mempedomani ketentuan dan peraturan Pilkada. Kampanye sesuai aturan dan tidak terpengaruh isu-isu negatif menyudutkan," tegas Djuwardi di Sekber Paslon Akbar, Ngramang, Kedungsari, Pengasih, Kulonprogo, Rabu (6/11).

Demikian kondisinya aman selama proses Pilkada, Djuwardi juga minta aparat penegak hukum de-



KR-Asrul Sani

**Drs Djuwardi (tengah) dan anggotanya mengeluarkan imbauan kampanye damai.**

ngan *leading sektor* Bawaslu melacak medsos yang menimbulkan kegaduhan dalam Pilkada berupa *black campaign*. "Kami minta Bawaslu melacak medsos yang tidak terdaftar dan merekah karena menyebarkan berita tidak benar. Jika terbukti melanggar UU ITE bisa ditindaklanjuti sesuai hukum," jelas Djuwardi.

Tim Pemenangan Akbar berharap Bawaslu mengundang ketua tim peme-

ngan ketiga paslon, untuk rapat koordinasi dalam upaya mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul. "Masyarakat sudah cerdas, tahu akun yang benar atau tidak. Mereka paham profil dan *track record* masing-masing Paslon peserta Pilkada," tuturnya.

Diungkapkan ada salah satu medsos tidak terverifikasi Bawaslu meresahkan, lantaran menyebar in-

fo negatif dan menyudutkan Paslon Akbar. Meski begitu, postingan medsos tersebut tidak berpengaruh signifikan dan akan hilang dengan sendirinya.

Ketua Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu setempat, Djoko Dwiyo mengatakan, hasil penelusuran Bawaslu, ada konten video berisi penggiringan opini negatif terhadap salah satu paslon.

"Banyak beredar video di Tik Tok menggiring opini negatif pada salah satu paslon dan menurut kami, hal itu sudah masuk *black campaign*," ujar Djoko menambahkan pihaknya baru menemukan satu video kampanye hitam yang terang-terangan dilakukan melalui tiktok.

(Rul/Wid)

## MUSIM TANAM TAHUN INI

### Stok Pupuk Bersubsidi Mencukupi Kebutuhan

**WONOSARI (KR)** - Stok pupuk bersubsidi di Kabupaten Gunungkidul pada musim tanam tahun ini mencukupi untuk kebutuhan petani untuk alokasi pupuk Urea mencapai 21.179 ton dan baru terserap 4.944,518 ton atau sekitar 23 persen dihitung sejak bulan lalu. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Raharjo Yuwono untuk alokasi pupuk subsidi NPK Phonska sebanyak 17.251 ton dan baru terserap sebanyak 4.694,135 ton atau 27 persen. "Sedangkan pupuk NPK Formula Khusus masih belum ada realisasi dari jumlah alokasi sebanyak 62 ton," katanya.

Dengan kondisi ketersediaan pupuk bersubsidi pihaknya mengimbau agar petani tidak khawatir karena kondisinya masih sangat aman karena pemerintah mengalokasikan pupuk subsidi tambahan. Saat ini hujan sudah mulai turun merata karena itu petani diminta segera melakukan pe-

nanaman dan puncaknya pada November ini. Sementara untuk meningkatkan penyerapan pupuk bersubsidi, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul telah mengeluarkan surat imbauan untuk persiapan musim tanam 2024/2025 mendatang. "Imbauan tersebut tertuang dalam surat edaran Nomor 500.6.4/1523 tanggal 13 September 2024 tentang Persiapan Musim Tanam 2024/2025," imbuhnya.

Terpisah Kepala DPP Kabupaten Gunungkidul Rismiyadi mengatakan, imbauan ini dikeluarkan dengan pertimbangan melihat prakiraan BMKG, musim hujan diperkirakan dimulai pada akhir Oktober 2024 dengan curah hujan mencapai 150 mm. Maka dari itu, pihaknya meminta agar petani sudah menyambut musim penghujan tersebut dengan melakukan penanaman.

(Bmp)

## Workshop Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Miras



KR-Istimewa

**Para guru SMKN 2 Pengasih mengikuti workshop.**

**WATES (KR)** - Sebagai upaya menjaga generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan minuman keras (miras), Polres Kulonprogo melalui Satuan Binmas menggelar workshop pencegahan di SMKN 2 Pengasih, Selasa (5/11). Materi workshop disampaikan Kasatbinmas Polres Kulonprogo, AKP Dina Martanti didampingi Banit Satbinmas, Briptu Anjar Susatya Aji dan dihadiri guru SMKN 2 Pengasih.

AKP Dina Martanti mengatakan, guru menjadi kepanjangan tangan dalam menyebarkan edukasi kepada para pelajar. Pendidikan mempunyai peran penting dalam mencegah masuknya pengaruh negatif narkoba dan miras di kalangan remaja atau pelajar.

"Kami mengajak semua pihak, khususnya para pendidik untuk pro aktif dalam melindungi anak didik dari ancaman narkoba dan miras. Beberapa langkah pen-

cegahan bisa dilakukan dengan mengedukasi tentang tanda-tanda awal penyalahgunaan yang perlu diwaspadai," kata AKP Dina.

Polres Kulonprogo mengimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan setiap indikasi peredaran narkoba dan miras di wilayahnya. Masyarakat diimbau tidak ragu-ragu menghubungi bhabinkamtibmas setempat atau Polsek terdekat jika mengetahui adanya aktifitas mencurigakan terkait peredaran narkoba dan miras.

Polres Kulonprogo juga menyediakan layanan aduan darurat melalui call center 110.

Workshop ini juga membuka ruang diskusi untuk para guru bertanya dan berbagi pengalaman mengenai permasalahan yang dihadapi di sekolah terkait isu ini. (Dan)

## CEGAH PENYIMPANGAN DANA DESA

### Percontohan, KPK Monitoring Kalurahan Gari

**WONOSARI (KR)** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia monitoring hasil penelitian terkait program Desa Anti Korupsi di Kalurahan Gari, Wonosari, Kamis (7/11). Program ini bertujuan untuk menilai keberhasilan desa-desa yang menjadi percontohan dalam penerapan transparansi dan integritas pengelolaan dana desa. Menyatakan "KPK hadir untuk memastikan implementasi program yang telah berjalan sejak 2021," kata Ketua tim monitoring KPK RI, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Aris Dedi Arham.

Kegiatan dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Gunungkidul Sujarwo MSi, Lurah Gari Widodo dan tamu undangan. Diungkapkan, program desa anti korupsi sebuah inisiatif KPK yang sudah dimulai sejak tahun 2021. Program ini berawal dari keprihatinan sejak tahun 2014. Saat pemerintah pusat menetapkan alokasi dana desa sebesar satu miliar rupiah per desa. Namun, pengelolaan dan pemanfaatan dana tersebut belum seragam. "Bahkan banyak ditemukan penyimpangan," ujarnya.

Kalurahan Gari berhasil menorehkan prestasi dengan skor 97,5, menjadikannya perwakilan Kabupaten Gunungkidul un-



KR-Dedy EW

**Direktur Pembinaan KPK Aris Dedy Arham bersama kades dan undangan.**

tuk DIY dalam program Desa Anti Korupsi. Aris menyatakan bahwa KPK ingin melihat langsung tata kelola pemerintahan di Kalurahan Gari, serta memberikan evaluasi agar desa ini dapat menjadi inspirasi bagi kalurahan lain di Yogyakarta maupun Indonesia. "Kalurahan Gari harapannya dapat menjadi contoh yang baik dan menjadi pem-

belajaran bagi pengembangan desa anti korupsi di wilayah lain. Ada lima komponen utama dengan 19 indikator yang harus dipenuhi dalam penilaian desa anti korupsi, dan ini adalah tantangan besar," ungkapnya.

Lurah Gari, Widodo, menyampaikan rasa bangga dan komitmennya dalam menjaga integritas pengelolaan desa. (Ded/Bmp)

## AGAR ADA TATA KELOLA YANG BAIK

### DPRD Usulkan Raperda Penyelenggaraan Pemakaman

**WONOSARI (KR)** - DPRD Kabupaten Gunungkidul mengajukan inisiatif Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Pemakaman. Swakarsa ini disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Heri Nungroho SS dan dihadiri PLT Bupati Heri Susanto SKom MSi. Raperda ini dilatar belakangi oleh empat faktor, terbatasnya ruang untuk pemakaman, pesatnya pertumbuhan penduduk, pemukiman yang dibangun oleh para pengembang (developer perumahan), dan pengelolaan pemakaman yang selama ini diselenggarakan oleh kalurahan dan



KR-Endar Widodo

**Rapat paripurna inisiatif Raperda Penyelenggaraan Pemakaman oleh DPRD Gunungkidul.**

masyarakat nampaknya perlu ditata kembali sebagai bentuk preventif penyelenggaraan pemakaman ke depan. Pertambahan penduduk dan pertumbuhan pemukiman tersebut berdampak pada kebutuhan lahan yang harus dipersiapkan untuk pemakaman oleh

pemerintah," kata Juru Bicara Pengusul Raperda Penyelenggaraan Pemakaman Bowo Sutrisno, beberapa hari lalu.

Untuk memberikan pedoman bagi semua pihak, katanya lebih lanjut, penyelenggaraan pemakaman, dalam raperda ini meng-

atur beberapa hal pokok, antara lain hak dan kewajiban pemakaman, lokasi tempat pemakaman, pengelolaan dan pemanfaatan tempat pemakaman serta tempat pemakaman fasilitas perumahan.

Diharapkan dengan peraturan daerah ini mampu mewujudkan terpenuhinya tempat pemakaman bagi seluruh masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

"Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Penyelenggaraan Pemakaman," tambahnya. (Ewi)